

Strategi Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pengelolaan Data Administrasi Hukum di Kejaksaan Negeri Bangil

Hertina Rhodhothul De Putri¹, Wahyu Eko Pujiyanto^{1*}

¹Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kejaksaan Negeri Bangil dalam mendukung pengelolaan data administrasi hukum secara efisien dan transparan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara selama kegiatan PKL. Hasil menunjukkan bahwa penguatan PTSP mencakup digitalisasi surat-menyurat melalui SIPEDE, pencatatan SPDP menggunakan CMS, distribusi manual berkas perkara, serta pelayanan tamu. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan hybrid antara sistem digital dan manual untuk menjawab keterbatasan infrastruktur. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model layanan publik hukum berbasis integrasi teknologi dan manajemen adaptif.

Kata kunci

Administrasi Hukum; Digitalisasi Layanan Publik; Manajemen Pelayanan Publik; Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Abstract

This study aims to describe the strategy for strengthening the One-Stop Integrated Service (PTSP) at the Bangil District Attorney's Office in supporting efficient and transparent legal administration data management. The method used is descriptive qualitative through observation, documentation, and interviews during PKL activities. The results show that strengthening PTSP includes digitizing correspondence through SIPEDE, recording SPDP using CMS, manual distribution of case files, and guest services. These findings indicate the need for a hybrid approach between digital and manual systems to address infrastructure limitations. This study contributes to the development of a legal public service model based on technology integration and adaptive management.

Keywords

Legal Administration; Digitalization of Public Services; Public Service Management; One-Stop Integrated Services.

Korespondensi
Wahyu Eko Pujiyanto
wahyueko.mnj@unusida.ac.id

Pendahuluan

Penguatan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan administrasi hukum, menempatkan Kejaksaan Negeri Bangil pada posisi yang menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan administratif secara efektif (Purba, 2023). Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk merespons kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang transparan dan efisien, di tengah permasalahan kompleks yang sering kali dihadapi dalam pengelolaan data administratif hukum. Oleh karena itu, penguatan PTSP di Kejaksaan Negeri Bangil sangat diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan data hukum yang lebih baik dan mengurangi potensi maladministrasi (Alfayn, 2022).

Urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi hukum, termasuk kejaksaan, yang berperan penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan (Fitriani and Jaya, 2023). Kualitas layanan publik yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Dampaka and Erliyana, 2025). Dalam konteks ini, pentingnya fokus pada indikator kualitas pelayanan menjadi jelas, mengingat kinerja instansi hukum sering kali dievaluasi berdasarkan persepsi masyarakat mengenai kecepatan dan efektivitas pelayanan (Rahim *et al.*, 2023).

Pelaksanaan PTSP berperan strategis dalam menciptakan efisiensi dan transparansi dalam administrasi hukum. Dengan adanya PTSP, proses pengajuan berkas, akses informasi, dan layanan lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat (Anzani, Kristya and Semarang, 2023). Di Kejaksaan Negeri Bangil, penguatan PTSP dapat membantu mengatasi masalah klasik dalam pengelolaan data administrasi hukum, seperti Sistem Pelayanan Data Perkara (SPDP) dan konfirmasi tamu (Kusumaningsih, 2025).

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan data administrasi hukum masih menghadapi beragam kendala yang kompleks dan sistemik. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis seperti lemahnya infrastruktur digital atau sistem informasi yang belum terintegrasi, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, seperti rendahnya komitmen terhadap standardisasi layanan dan kurangnya sinergi antarunit kerja. Praktik maladministrasi, kesulitan akses terhadap data yang akurat dan real-time, serta lemahnya koordinasi lintas fungsi menimbulkan risiko terhadap integritas proses hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan (Alawiyah *et al.*, 2025). Permasalahan ini mencerminkan masih lemahnya tata kelola internal dan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*). Namun, studi yang secara spesifik mengulas strategi PTSP dalam konteks kejaksaan dengan pendekatan hybrid masih terbatas.

Kondisi tersebut menuntut adanya analisis mendalam terhadap seluruh aspek pengelolaan data, mulai dari struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme kerja antarbagian, hingga sistem informasi yang digunakan. Strategi penguatan PTSP tidak dapat dirancang secara parsial, melainkan harus mengadopsi pendekatan sistemik yang mencakup restrukturisasi alur kerja, pengembangan digitalisasi layanan hukum, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan. Dalam hal ini, audit manajemen dan evaluasi berbasis indikator kinerja sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar relevan dengan akar masalah yang dihadapi (Nasrullah *et al.*, 2022). Pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based approach*) menjadi kunci untuk membangun sistem PTSP yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan internal institusi, tetapi juga adaptif terhadap dinamika permintaan masyarakat akan layanan hukum yang berkualitas.

Konsep manajemen administrasi publik dan layanan satu pintu perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Keberhasilan penerapan PTSP dalam pengelolaan data administrasi hukum sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan digital (Alfayn, 2022). Transformasi digital diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan pelayanan publik, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit (Kusumaningsih, 2025).

Melalui penelitian ini, tujuan utama adalah untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan dalam memperkuat PTSP di Kejaksaan Negeri Bangil, guna mendukung pengelolaan data administrasi hukum dengan cara yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga berupaya mengisi gap penelitian dengan memberikan kontribusi baru mengenai implementasi PTSP dalam konteks hukum di Indonesia, serta menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi penguatan PTSP dapat diterapkan untuk memperbaiki manajemen administrasi hukum di daerah tersebut.

Dengan menemukan solusi yang tepat dan menjadikan PTSP sebagai pusat dari berbagai aktivitas administrasi, diharapkan dapat terbentuk sebuah sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pengelolaan data administrasi hukum. Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Bangil dan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Subjek penelitian adalah peneliti yang bertindak sebagai partisipan aktif dan secara langsung terlibat dalam kegiatan pelayanan di unit PTSP. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan surat menyurat, pengelolaan Sistem Penerimaan Data Perkara (SPDP), penyampaian berkas perkara, serta pelayanan dan konfirmasi tamu. Posisi peneliti memberikan perspektif empiris terhadap proses pelayanan hukum yang berjalan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap proses kerja dan interaksi di lingkungan PTSP, dokumentasi terhadap berbagai aktivitas administratif dan alur layanan, serta wawancara informal dengan beberapa pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas PTSP. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola tematik yang muncul. Teknik-teknik ini dipilih untuk memastikan kedalaman data yang diperoleh dan untuk menangkap dinamika riil yang terjadi di lapangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada pola-pola temuan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang relevan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi layanan PTSP di Kejaksaan Negeri Bangil.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa strategi penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kejaksaan Negeri Bangil berpusat pada empat aspek utama, yaitu efisiensi pengelolaan administrasi surat-menyurat, pengelolaan SPDP secara digital, mekanisme distribusi berkas perkara, serta peningkatan pelayanan dan konfirmasi tamu. Keempat tema tersebut muncul dari hasil observasi dan wawancara mendalam selama kegiatan penelitian dan menunjukkan kontribusi PTSP dalam menciptakan pelayanan administrasi hukum yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Temuan dikelompokkan ke dalam empat tema utama:

1. Penguatan Administrasi Surat-Menyurat Digital:
Meliputi pengarsipan, digitalisasi, dan penginputan surat melalui sistem SIPEDE.
2. Optimalisasi Pengelolaan SPDP:
Pelaksanaan proses penginputan SPDP menggunakan CMS sebagai bentuk efisiensi administrasi.
3. Distribusi Manual Berkas Perkara:
Proses penyerahan dan pendistribusian BAP yang masih manual namun sistematis.
4. Peningkatan Pelayanan Tamu Publik:
Pelibatan petugas dalam pelayanan tamu, verifikasi, dan penanganan administrasi langsung di *front-office*.

“Kami input SPDP langsung di CMS sesuai format yang ada, dari nama tersangka, tanggal surat, hingga pasalnya. Tapi kadang jaringan lambat, jadi butuh sabar.” — (Staf PTSP, 15 Juli 2024).

“Surat masuk selalu kami scan dan catat di SIPEDE. Setelah itu kami buat lembar disposisi sebelum dikirim ke seksi terkait.” — (Karyawan Subbag TU, 10 Juli 2024).

“BAP kami catat manual dulu di buku agenda, baru kami konfirmasi ke bagian pidum untuk penyerahan fisik berkas.” — (Staf Administrasi, 22 Juli 2024).

Kutipan di atas memperkuat bahwa proses kerja di PTSP memadukan teknologi informasi dengan kerja manual yang terorganisir.

Temuan ini konsisten dengan literatur tentang pelayanan publik digital di sektor hukum. Penggunaan CMS dan SIPEDE mencerminkan penerapan prinsip e-Government dalam pengelolaan administrasi hukum. Namun, kombinasi sistem digital dan manual menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi belum sepenuhnya mendukung otomatisasi proses. Ini menunjukkan adanya transisi bertahap menuju sistem informasi terintegrasi yang optimal (Deha, 2024).

Tiap tema saling terhubung. Administrasi surat menyurat yang efisien mempercepat pengelolaan SPDP. SPDP yang cepat dicatat memperlancar pendistribusian BAP. Pelayanan publik yang baik memperkuat rantai komunikasi antara internal kejaksaan dan masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bahwa penguatan PTSP harus dilakukan secara sistemik, bukan sektoral.

Stabilitas jaringan internet dan kelengkapan perangkat digital menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem CMS dan SIPEDE. Selain itu, budaya kerja instansi yang masih konvensional dalam pendistribusian berkas juga menjadi tantangan. Kebutuhan akan SDM yang melek teknologi juga menjadi tantangan eksternal yang belum sepenuhnya teratasi.

Temuan mengejutkan muncul saat diketahui bahwa beberapa bagian masih menggunakan pencatatan manual meskipun telah tersedia sistem digital. Hal ini kontras dengan asumsi awal bahwa sistem informasi sudah terimplementasi secara menyeluruh. Peneliti menyikapi hal ini sebagai indikasi kebutuhan akan pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut kepada SDM terkait sistem digital.

- Sistem SIPEDE dan CMS membantu pengelolaan data surat dan SPDP meskipun masih menghadapi kendala teknis.
- Distribusi berkas perkara (BAP) masih dilakukan secara manual dengan sistem pengarsipan yang tertata.
- Pelayanan publik di PTSP melibatkan proses konfirmasi dan verifikasi multi-tahapan.
- Infrastruktur teknologi dan koordinasi antar-seksi memengaruhi efektivitas pengelolaan administrasi.

Temuan penelitian ini penting untuk penguatan praktik manajemen administrasi publik di sektor penegakan hukum. Hasil penelitian mendukung teori tentang pentingnya digitalisasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan adaptif terhadap transisi dari sistem manual ke digital. Studi ini juga memberikan gambaran praktis untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas pelayanan PTSP berbasis manajemen modern.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memperkuat strategi pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kejaksaan Negeri Bangil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan PTSP berdampak langsung terhadap efisiensi pengelolaan data administrasi hukum, keterhubungan antarbagian, dan kepuasan layanan publik. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan tujuan awal untuk menganalisis sistem kerja PTSP dan menjawab permasalahan terkait optimalisasi pelayanan berbasis digital dan tata kelola berkas perkara.

Penggunaan aplikasi SIPEDE dan CMS pada proses surat-menyurat dan SPDP mempercepat alur pengolahan data. peneliti mencatat bahwa input data surat masuk secara digital dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen dan mempercepat disposisi. Hal ini sejalan dengan temuan (Deha, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi memperkuat efisiensi administratif di lembaga publik. Namun, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala yang memerlukan perhatian. Efektivitas digitalisasi tergantung pada stabilitas jaringan dan kesiapan SDM pengguna.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada digitalisasi penuh, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid justru lebih sesuai pada institusi dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur. Meskipun digitalisasi diterapkan, proses distribusi berkas perkara seperti BAP masih dilakukan secara manual. Namun, pencatatan sistematis melalui buku agenda dan lembar disposisi menunjukkan manajemen manual masih relevan dan dapat diintegrasikan dengan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi publik perlu mengembangkan sistem hybrid yang sesuai konteks (Astuti, Sulisman and Tarigan, 2023). Penerapan stempel agenda dan konfirmasi lintas bagian membantu menjaga ketertelusuran dokumen.

Pelayanan kepada tamu dan masyarakat di bagian PTSP menunjukkan pentingnya pelayanan berbasis kejelasan informasi. Peneliti mencatat bahwa konfirmasi kebutuhan tamu dan validasi dokumen sering kali memakan waktu karena alur persetujuan yang berlapis. Namun, dengan adanya SOP dan komunikasi antarseksi, kepercayaan publik dapat dipertahankan. Akses dan keterbukaan informasi sangat menentukan persepsi kualitas layanan publik (Sukmawati *et al.*, 2023).

Semua temuan mengindikasikan bahwa penguatan PTSP tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi sistem digital dan manual, optimalisasi alur distribusi berkas, serta peningkatan kualitas interaksi layanan publik. Strategi yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola administrasi hukum yang lebih tertata dan terukur.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Balaji, 2025) dalam *Government Information Quarterly* (Q1) yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan efisiensi, khususnya dalam pengelolaan dokumen hukum. Selain itu, studi oleh (Alhujran, 2009) menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi dalam layanan pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di konteks lembaga hukum, otomatisasi pengolahan data hukum terbukti mempercepat proses birokrasi dan menurunkan biaya operasional (Irfan, 2017). Hal ini memperkuat dasar bahwa penerapan sistem digital di PTSP adalah arah strategis yang tepat.

Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Berbeda dengan studi (Hujran *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa sistem layanan digital berbasis cloud dapat berjalan efektif di semua konteks organisasi publik (Q2), penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hibrid (digital dan manual) lebih cocok diterapkan di lembaga penegakan hukum yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem layanan bertahap berbasis kebutuhan lokal, sekaligus pelatihan intensif kepada petugas di lini pelayanan.

Diskusi ini menunjukkan bahwa strategi penguatan PTSP di Kejaksaan Negeri Bangil berhasil meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan sistem layanan yang adaptif terhadap kondisi infrastruktur. Integrasi antara sistem manual dan digital serta peningkatan kualitas layanan tatap muka berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan data administrasi hukum yang transparan dan efisien.

Penelitian ini menyajikan kebaruan dalam pendekatan integratif PTSP antara sistem digital dan manajemen manual dalam konteks pengelolaan data hukum di instansi kejaksaan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya menekankan digitalisasi layanan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid justru lebih realistis dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Studi ini juga mengisi celah dalam literatur terkait praktik administratif hukum di lembaga penegakan hukum lokal, yang selama ini jarang dikaji secara manajerial.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan manajemen layanan publik berbasis integrasi sistem digital dan manual dalam tata kelola administrasi hukum. Kontribusi ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk mengembangkan model PTSP adaptif yang sesuai dengan kompleksitas kelembagaan dan kesiapan teknologi lokal.

Limitasi

Kajian kegiatan penelitian ini terbatas ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu instansi, sehingga generalisasi temuan ke lembaga penegak hukum lainnya masih memerlukan kajian lanjutan.

Kesimpulan

Hasil studi ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan internal kejaksaan untuk penguatan sistem PTSP yang kontekstual dan bertahap. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan strategi PTSP melalui digitalisasi, pencatatan manual yang terstandar, serta peningkatan pelayanan publik berdampak signifikan terhadap pengelolaan data administrasi hukum. Sistem aplikasi SIPEDE dan CMS membantu efisiensi kerja, meskipun integrasi manual masih diperlukan dalam konteks distribusi berkas perkara. Pelayanan tatap muka yang akurat dan responsif turut memperkuat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri Bangil. Penguatan strategi PTSP melalui integrasi digital-manual terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi hukum. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan strategi manajerial layanan hukum publik berbasis sistem integratif yang adaptif terhadap tantangan infrastruktur dan sumber daya. Penelitian ini terbatas pada konteks lokal Kejaksaan Negeri Bangil dan belum mencakup perbandingan antarinstansi hukum di wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem PTSP adaptif di berbagai institusi hukum serta menguji pendekatan berbasis teknologi penuh di konteks yang lebih luas.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Bangil Kabupaten Pasuruan atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra penelitian.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, K. *et al.* (2025) 'Dampak Skandal Korupsi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik', *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 3(1), pp. 231–237.
- Alfayn, M.A.N. (2022) 'From E-Government to Good Governance: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia', *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), pp. 19–40. Available at: <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>.
- Alhujran, O. (2009) 'Determinants of E-Government Services Adoption in Developing Countries: A Field Survey And A Case Study', *Information System and Technology University of Wollongong*, p. 340.
- Anzani, S.R., Kristya, V.N. and Semarang, U.N. (2023) 'Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Good Governance', *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(1), pp. 196–209.
- Astuti, I.I., Sulisman, A.N. and Tarigan, S.R.D.B. (2023) 'Eksplorasi E-Governance: Menjawab Tantangan Implementasi E-Commerce Era Vuca di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 13(2), pp. 166–176. Available at: <https://doi.org/10.37598/jimma.v13i2.1865>.
- Balaji, K. (2025) 'E-Government and E-Governance: Driving Digital Transformation in Public

Administration', in *Public Governance Practices in the Age of AI*, pp. 23–44. Available at: <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9286-7.ch002>.

Dampaka, Y. and Erliyana, A. (2025) 'Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20 / G / KI / 2021 / PTUN . SRG', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), pp. 2433–2443. Available at: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4382>.

Deha, D. (2024) 'Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Program Studi D3 Sekretari pada Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial)', *Jurnal Lemondial Business School*, 10(2), pp. 1–10.

Fitriani, Y. and Jaya, W.R. (2023) 'Strategi Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Sistem Informasi Administrasi Di Kelurahan Komerling Agung', *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), pp. 36–42. Available at: <https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.93>.

Hujran, O. *et al.* (2023) 'Digitally Transforming Electronic Governments into Smart Governments: SMARTGOV, an Extended Maturity Model', *Information Development*, 39(4), pp. 811–834. Available at: <https://doi.org/10.1177/02666669211054188>.

Irfan, M.I.M. (2017) 'The Role of E-Governance in Administrative Efficiency and Combating Corruption : Case of Sri Lanka', *Global Journal of Management and Business Research*, 17(2), pp. 1–13.

Kusumaningsih, R. (2025) 'Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), pp. 385–398.

Nasrullah, N. *et al.* (2022) 'Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Wakaf di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul', *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.18196/ppm.46.829>.

Purba, H.S. (2023) 'Strategi Komunikasi Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai', *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 7(1), p. 77. Available at: <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v7i1.16598>.

Rahim, A. *et al.* (2023) 'Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), pp. 5790–5794.

Sukmawati, H.W. *et al.* (2023) 'Analisis Ketersediaan Infrastruktur Dan Akses Teknologi Sebagai Pendukung Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(551), pp. 746–759.